

4 BULAN, 11 BPR DILIKUIDASI

'Fraud' Jadi Musuh Utama BPR

DALAM empat bulan pertama di tahun 2024 ini terdapat fenomena cukup menarik di dunia perbankan nasional, khususnya pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Bagaimana tidak, selama Kuartal I-2024 dari 1 Januari hingga 30 April 2024 sudah ada 11 BPR yang dilikuidasi. Apa yang sebenarnya terjadi?

Menurut Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono, sebenarnya kalau dilihat dari skala perbankan nasional, adanya 11 BPR yang dilikuidasi dalam tempo 4 bulan ini tidaklah begitu berpengaruh terhadap perbankan nasional. Karena BPR yang dilikuidasi itu umumnya merupakan BPR-BPR kecil, ada yang asetnya hanya Rp 9 miliar. Di sisi lain, masih sangat banyak BPR yang dalam kondisi sehat atau baik-baik saja.

"Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi perbankan nasional secara keseluruhan. Beda kondisinya jika misalnya yang dilikuidasi itu Bank Umum yang besar-besar. Likuidasi ini juga untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan khususnya BPR. Sebab, meskipun dilikuidasi, simpanan nasabah tetap aman karena dijamin LPS. Kendati tidak terlalu berpengaruh

terhadap perbankan nasional, namun kita tetap harus hati-hati, tidak boleh menganggap remeh," papar Didik Madiyono dalam Temu Media-LPS yang diikuti jurnalis dari Yogyakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar) di Hotel Alila Solo, Minggu (12/5/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, Didik Madiyono didampingi Direktur Grup Likuidasi Bank LPS Daly Rustambin dan Direktur Grup Penanganan Klaim LPS Sofyan Baehaqie, serta Kepala Divisi Humas LPS Haydin Haritzon (Heris).

Didik Madiyono mengungkapkan, berdasarkan data per 8 Mei 2024, LPS telah membayarkan klaim simpanan nasabah Rp 291 miliar lebih dari 48.000 rekening nasabah bank yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dilikuidasi oleh LPS. Pembayaran klaim simpanan nasabah tersebut masih terus dilakukan kepada para nasabah dari 11 BPR yang dilikuidasi LPS dalam kurun waktu 1 Januari hingga 30 April 2024.

Mengenai kemampuan keuangan LPS untuk membayar klaim simpanan milik nasabah BPR-BPR tersebut, Didik Madiyono menegaskan, keuangan LPS sangat memadai kalau 'hanya' untuk membayar simpanan nasabah tersebut. Sebab aset LPS sampai

akhir Triwulan I-2024 telah mencapai Rp 225 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun ini. "Tentu saja angka Rp 225 triliun ini sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan Rp 291 miliar tadi. Jadi tidak ada masalah bagi LPS untuk membayarkan klaim para nasabah BPR yang dilikuidasi tadi," ujar Didik Madiyono.

Menurut Didik, sumber dana LPS itu berasal dari modal awal yang disetor Pemerintah sebesar Rp 4 triliun, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank menjadi peserta, premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester sebesar 0,1 persen dari Dana Pihak Ketiga, serta dari hasil investasi.

Bercermin dari dilikuidasinya 11 BPR tersebut, ternyata musuh utama BPR adalah fraud atau tindak kecurangan, penipuan, ketidakjujuran dalam pengelolaan bank. Sebab ketika ditanya 'KR' mengenai penyebab utama kegagalan 11 BPR tersebut, menurut Didik Madiyono, 100 persen atau seluruhnya faktor utamanya karena fraud. "Penyebab utamanya itu 100 persen karena fraud ya. Misalnya ada kredit topangan, kredit fiktif, angsuran dimarkup, seolah-olah asetnya gede tetapi sebenarnya kopong, laporan keuangannya tidak benar atau tidak reliable, dan sejenisnya," jelas Didik.

Sebenarnya, lanjut Didik, masyarakat sudah bisa mendeteksi ketidakberesan sebuah bank dari layanan kepada nasabah. Misalnya, saat nasabah akan mengambil uangnya tidak langsung dipenuhi. "Kalau jawabannya tarsok-tarsok (bentar besok) terus, kita patut waspada. Wah jangan-jangan bank ini gak ada uangnya," kata Didik.

Untuk itu, LPS juga terus melakukan berbagai langkah preventif bersama Asosiasi BPR/BPR Syariah dalam hal ini Perhimpunan Perbankan Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) untuk meningkatkan tata kelola BPR melalui berbagai diskusi dan workshop, sehingga penutupan atau pencabutan izin usaha BPR ini tidak mesti terjadi. Sebab mayoritas BPR ditutup karena persoalan minimnya tata kelola.

"Tapi harus diingat pula, jumlah BPR saat ini ada lebih dari 1.500. Jadi masih banyak BPR yang sehat dan bagus-bagus. Bukan berarti maraknya penutupan BPR akhir-akhir ini lantas membuat nama BPR rusak secara keseluruhan. Sebab banyak sekali



Didik Madiyono berdiskusi dengan jurnalis.

BPR yang memiliki peran dalam membantu perekonomian masyarakat di berbagai wilayah dengan beragam inovasi produk yang menarik. Dan bagi nasabah tidak perlu khawatir karena semua bank di Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS. Jika ada bank dicabut izin usahanya LPS akan menjamin simpanan nasabah," tandas Didik Madiyono.

Didik pun senantiasa mengingatkan masyarakat untuk memahami syarat penjaminan simpanan oleh LPS yang disebut dengan 3T, yakni Tidak terindikasi melakukan fraud dan/atau terbukti melakukan fraud (tindak pidana di bidang perbankan), Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS, serta Tercatat dalam pembukuan bank dalam hal ini cashback diperhitungkan sebagai komponen bunga.

Sedangkan produk perbankan yang dijamin oleh LPS untuk bank konvensional terdiri giro, deposito, sertifikat deposit, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara untuk bank syariah berupa giro wadiah dan giro mudharabah, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah simpanan lain yang ditetapkan LPS.

Sementara nilai simpanan yang dijamin berdasarkan UU No 24 Tahun 2004 sebesar maksimal Rp 100.000.000 pernasabah perbank dan berdasarkan PP No 66 Tahun 2008 nilai simpanan yang dijamin dinaikkan menjadi Rp 2.000.000.000 pernasabah perbank.

Sejak LPS beroperasi tahun 2005 sampai 7 Mei 2024, secara

nasional LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 133 bank yang dicabut izin usahanya. Dari 133 bank itu terdiri 132 BPR/BPRS dan 1 Bank Umum, mencakup total simpanan Rp 2,74 triliun dengan jumlah rekening 373.986. Dari nominal itu, untuk Bank Umum senilai Rp 357 miliar dan BPR/BPRS Rp 2,38 triliun.

Khusus di wilayah Jawa Tengah, sejak LPS beroperasi 2005 sampai 7 Mei 2024, LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 11 bank yang dicabut izin

usahanya. Ke-11 bank itu semuanya BPR/BPRS dengan total simpanan Rp 187,12 miliar mencakup 32.466 rekening. Sementara khusus di wilayah DIY sejak 2005 sampai 7 Mei 2024 LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 2 bank yang dicabut izin usahanya terdiri 2 BPR/BPRS dengan total simpanan Rp 55,21 miliar mencakup 13.335 rekening.

Didik Madiyono menyampaikan, LPS terus berinovasi untuk menjaga kepercayaan nasabah perbankan. Terbaru, LPS melakukan dua terobosan dalam penanganan bank gagal, yakni percepatan proses pembayaran klaim bank yang dicabut izin usahanya dan early intervention dalam penanganan bank.

"Dalam rangka memberikan rasa tenang kepada masyarakat khususnya nasabah BPR yang dilikuidasi, Tim LPS bergerak cepat dimana secara rata-rata pembayaran klaim sudah mulai dilakukan 5 hari kerja sejak dicabut izin usahanya oleh OJK. Sementara tahun-tahun sebelumnya memakan waktu sekitar 9-14 hari kerja," ujar Didik. (M Nur Hasan)



Petugas menjelaskan tentang penjaminan simpanan nasabah oleh LPS.

WISATA

PESANGGRAHAN GUMBIRAWATI

Destinasi Wisata yang Masih Menyimpan Misteri

SEKILAS orang melihatnya sebagai candi. Terbuat dari batu dan ada tangga naik ke lantai kedua. Hanya bagaimana bentuk sebenarnya, masih belum diketahui. Itu bangunan candi atau pesanggrahan?

Pertanyaan yang bisa dipahami. Yang tersisa adalah dinding batu memanjang. Berada pada perbukitan kapur dengan ketinggian 126,50-130 meter di atas permukaan laut. Di belakangnya masih terdapat

kok di atas bukit," papar Andi bernada tanya.

Penjelasannya menurut Andi tidak sulit. Dengan memahami bahwa kepercayaan bisa saling memengaruhi, mungkin saja 'terpengaruh' kepercayaan sebelumnya. Atau ada maksud lain yang belum diketahui.

Hanya lebih banyak yang sepakat menyebut, bangunan itu adalah 'sisa' Pesanggrahan Gumbirawati, salah satu dari belasan pesanggrahan yang

pesanggrahan Sri Sultan Hamengku Buwono II. "Tetapi bagaimana bentuk bangunan apakah ada semacam bangunan rumah, saya tidak paham," ungkap Yogi dalam bahasa Jawa.

Mengutip papan informasi, Yogi menyebut bila bangunan ini pernah dipugar tahun 1991-1993. Sedang dari laman kemdikbud.go.id disebutkan, dalam Oudheidkundige Verslag (OV) 1925 FDK Bosch dalam tulisannya mengenai peninggalan-peninggalan di sekitar Kali Opak menyinggung adanya Situs Gumbirowati. "Bosch berpendapat bila melihat gaya arsitektur bangunan melalui bentuk pilar dan hiasan diperkirakan peninggalan ini dibangun pada pertengahan Abad ke-16. Sebagai tempat pesanggrahan/istirahat HB II pada masa pemerintahannya selama tiga periode pada kurun waktu 1792-1828," jelasnya.

Cerita Rakyat
Tersembunyi di bukit bebatuan kapur, keberadaan Pesanggrahan Gumbirawati pun dikaitkan dengan beberapa versi cerita rakyat tutur tinular. Salah satu versi ialah cerita Dewi Citrowati yang menikah dengan saudara kandungnya, Sri Dipo Kusumo, hal tersebut terjadi lantaran mereka berpisah sejak kecil, sehingga tidak tahu.

Orangtuanya mengetahui perkawinan sedarah tersebut, sehingga mereka dibuang di Pesisir Selatan Pulau Jawa. Dewi Citrowati yang dibuang oleh ayahnya ini kemudian mendirikan Pesanggrahan Gumbirowati.

Lokasi Pesanggrahan Gumbirowati ada di Dusun Watugajah, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul. Bangunan ini merupakan situs yang dilindungi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), sekarang Balai Pelestari Kebudayaan (BPK) DIY.

Namun untuk mengunjungi



Hiasan batu karang di dinding bawah pesanggrahan.

pohon-pohon yang berumur sangat tua, seperti randu alas, gayam, klepu, pule, dan ancar yang tingginya antara 15 hingga 25 meter. Bahkan terdapat juga semacam air terjun yang membuat suasana begitu syahdu.

Bangunan kuno itu berada di atas bukit. Biasanya, yang di atas bukit adalah bangunan candi. Namun yang perlu dipahami, ungkap arkeolog yang juga Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Gunungkidul, Andi Riana, kebudayaan itu berkelanjutan, tidak mandeg.

Sementara, kepercayaan bisa memengaruhi dan membuat terjadinya keberlanjutan. "Memang biasanya yang di bukit itu bangunan suci Hindu. Ini disebut pesanggrahan dari kerajaan Islam,

dibangun zaman Sri Sultan Hamengku Buwono II. "Bagaimana bentuknya dan apakah Kraton Ngayogyakarta juga memiliki gambarnya, kita tidak tahu. Hanya kisah Sultan atau kerabat Sultan Yogya yang mengunjungi untuk nenepi, istirahat dan lainnya, pernah didengar," lanjut Andi Riana.

Misteri
Bisa dikatakan, Pesanggrahan Gumbirawati masih misteri. Tetapi juru pelihara (jupe) pesanggrahan Yogi ketika dijumpai belum lama ini mengungkapkan, bangunan di tanah SG dengan luas sekitar 11.930 meter persegi ini setahunya merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai



Sebagian dinding Pesanggrahan Gumbirawati.

kawasan ini lebih dekat melalui Pantai Parangtritis naik ke arah Bukit Paralayang. Tidak jauh dari pintu jaga penarik karcis ke Bukit Paralayang, belok ke kiri. Dan hanya bisa dengan kendaraan pribadi ukuran kecil.

"Pengunjung, ada. Tapi dalam keseharian tidak selalu. Apalagi pesanggrahan kan posisinya berada di jalan buntu," ungkap Yogi. Walau sebenarnya Pesanggrahan Gumbirowati tidak jauh dari lokasi Goa Jepang, Goa Suracala/Sunan Mas dan juga Sendang Suracala. Selain juga dekat dengan Bukit Paralayang, Pantai Parangtritis.

Mungkin, perlu dibuat rute atau destinasi berkelanjutan yang saling berdekatan. Hanya sarana-prasarananya terutama akses jalan perlu diperbaiki.

Bangunan batu ini tidak jauh dari Parangtritis, berbentuk dua dinding yang memanjang dengan arah Barat-Timur. Sisa bangunan pertama sekitar 22 meter. Pada bagian dinding terdapat panel-panel dengan hiasan geometris dan karang laut. Unsur-unsur pada Pesanggrahan Gumbirowati mempunyai kemiripan dengan unsur hiasan pada bangunan-bangunan masa klasik dan masa Islam.

(Tulisan dan Foto: Fadmi Sustiwi)



Suasana pesanggrahan dari bagian atas.